



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR : 02 TAHUN : 2000 SERI : D. 2.

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR : 11 TAHUN : 1999

T E N T A N G

TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGUNDANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Bab VI Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengundangan Peraturan Daerah.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a', perlu ditetapkan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGUNDANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Bupati adalah Bupati Indramayu.
3. DPRD adalah DPRD Kabupaten Indramayu.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
5. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu.
8. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.
9. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Kabupaten Indramayu yang mempunyai sifat mengatur.

**BAB II**  
**TATA CARA PEMBUATAN PERATURAN DAERAH DAN**  
**PERATURAN DAERAH PERUBAHAN**

**Bagian Pertama**

**Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah**

**Pasal 2**

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat berupa usul dari Kepala Daerah maupun Usulan dari DPRD.

- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diajukan dalam Rapat Paripurna DPRD untuk mendapat persetujuan dengan penjelasan resmi dari:
  - a. Bupati apabila Rancangan itu dari Kepala Daerah;
  - b. Pimpinan DPRD apabila Rancangan Peraturan Daerah datang dari DPRD.
- (3) Setelah mendapat Persetujuan DPRD, Peraturan Daerah tersebut ditetapkan dan ditandatangani oleh Bupati dan selanjutnya dibubuhi Cap Jabatan.

### Pasal 3

Peraturan Daerah yang telah ditandatangani dan Cap Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini, 2 (dua) eksemplar diserahkan kepada Sekretaris Daerah untuk :

- a. Diundangkan dalam Lembaran Daerah;
- b. Disampaikan kepada Pemerintah dengan jangka waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan.

### Pasal 4

Khusus mengenai Tata Cara Pembuatan dan Pengundangan Peraturan Daerah yang menyangkut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selama Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah beserta peraturan Pelaksanaannya belum dicabut masih tetap berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 2 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.

## Bagian Kedua

### Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan

### Pasal 5

Bentuk Peraturan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 6

Bentuk Peraturan Daerah Perubahan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 7

Petunjuk Penyusunan Peraturan Daerah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 8

- (1) Peraturan Daerah Perubahan terdiri dari 2 (dua) Pasal Romawi yang terdiri dari :
  - a. Pasal I, berisikan materi-materi Bab, Pasal dan ayat yang akan diubah dan perubahannya.
  - b. Pasal II, berisi pemberlakuan Peraturan Daerah Perubahan.
- (2) Bunyi Bab, Pasal dan ayat yang akan diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal 8 perlu disebutkan lagi dalam Peraturan Daerah Perubahan.

#### Pasal 9

Peraturan Daerah hanya dapat diubah sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dan seterusnya harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah baru.

#### Pasal 10

Peraturan Daerah dibuat di atas kertas HVS ukuran folio yang beratnya 80 gram dan ditik dengan huruf standar.

### **BAB III PENGUNDANGAN**

#### Pasal 11

- (1) Pengundangan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini selambat-lambatnya dalam 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Daerah dimaksud.

#### Pasal 12

- (1) Setiap Pengundangan produk hukum daerah dalam Lembaran Daerah diberi Nomor dan Nomor Seri tertentu sesuai dengan jenis produk hukum tersebut.
- (2) Nomor Seri untuk Lembaran Daerah adalah sebagai berikut:
  - Seri A : bagi pemuatan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.
  - Seri B : bagi pemuatan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.
  - Seri C : bagi pemuatan Peraturan Daerah yang memuat Ancaman Pidana.
  - Seri D : bagi pemuatan Peraturan Daerah tentang Kelembagaan dan Peraturan Daerah yang tidak termasuk dalam Seri A, B, C.
  - Seri E : Bagi Pemuatan Keputusan Bupati yang mempunyai sifat mengatur.

### **BAB IV TATA CARA PEMBUATAN LEMBARAN DAERAH**

#### Pasal 13

- (1) Tata cara pembuatan Lembaran Daerah adalah sebagai berikut :
  - a. Pada bagian atas ditulis dengan huruf kapital "LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU".
  - b. Dibawah judul tersebut termuat Lambang Daerah.
  - c. Disebelah kiri, dibawah Lambang Daerah dicantumkan Nomor Lembaran Daerah, kemudian ditengah-tengah dicantumkan Tahun Pengundangan dan disebelah kanannya dicantumkan Nomor Seri dari Lembaran Daerah yang bersangkutan, setelah 1/2 Cm dibawahnya diberi Garis tebal.
  - d. 1 (satu) Cm setelah garis dimaksud huruf c ayat ini, dimuat secara lengkap isi produk hukum daerah yang bersangkutan dengan ketentuan cap dan tanda tangan Kepala Daerah maupun Sekretaris Daerah diganti dengan sebutan Cap/ttd.
- (2) Bentuk Lembaran Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 2 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu dinyatakan tidak berlaku kecuali mengenai Bab dan Pasal yang mengatur Ketentuan Peraturan Daerah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu  
pada tanggal 24 - 12 - 1999

BUPATI INDRAMAYU  
Cap.ttd

OPE MUSTOFA

Diundangkan di Indramayu  
pada tanggal 10 - 01 - 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap.ttd

ADIS ROHANDA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR : 02 TAHUN : 2000 SERI : D.2.

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR : 13 TAHUN 1999  
TANGGAL : 24 DESEMBER 1999  
TENTANG : TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGUNDANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAMAYU

Contoh Bentuk Peraturan Daerah

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR ..... TAHUN .....} 1 1/2 Spasi

TENTANG

( Nama Peraturan Daerah )

} 2 Spasi

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

} 2 Spasi

BUPATI INDRAMAYU

} 3 Spasi

Menimbang : a. bahwa .....; } 1 1/2 Spasi

} 2 Spasi

b. bahwa .....; } 1 1/2 Spasi

} 2 Spasi

c. dan seterusnya ..

} 2 Spasi

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ...Tahun ...tentang ... (Lembaran Negara} 1 1/2 Spasi  
Republik Indonesia Tahun...Nomor.., Tambahan Lembaran Negara Republik  
Nomor....);

} 2 Spasi

2. Peraturan Pemerintah Nomor ..Tahun..tentang ..(Lembaran Negara} 1 1/2 Spasi  
Republik Indonesia Tahun...Nomor.., Tambahan Lembaran Negara Republik  
Nomor....);

3. ....;

} 2 Spasi

4.dan seterusnya ..

} 2 Spasi

Dengan persetujuan

} 2 Spasi

DEWAN PERWAKILAAAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

} 2 Spasi

M E M U T U S K A N :

} 2 Spasi

Menetapkan :\_PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU (Nama Peraturan Daerah)

} 2 Spasi

BAB I } 2 Spasi  
Pasal 1 } 2 Spasi  
BAB ... } 2 Spasi  
Pasal ... } 2 Spasi  
BAB ... } 2 Spasi  
Pasal ... } 2 Spasi  
dan seterusnya ...  
Pasal ...

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

} 2 Spasi  
} 1 1/2 Spasi  
} 3 Spasi  
Ditetapkan di Indramayu  
pada tanggal .....  
} 1 1/2 Spasi  
BUPATI INDRAMAYU

( Tanda tangan )  
} 3 Spasi  
N A M A

Diundangkan di Indramayu\_

pada tanggal .....

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

( Tanda tangan )  
N A M A

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR ..... TAHUN ..... SERI .....

} 2 Spasi  
} 3 Spasi  
} 3 Spasi



LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR : 13 TAHUN 1999  
TANGGAL : 24 DESEMBER 1999  
TENTANG : TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGUNDANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Contoh Bentuk Peraturan Daerah Perubahan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR ..... TAHUN ..... } 1 1/2 Spasi  
TENTANG  
PERUBAHAN ..... PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR .....  
TAHUN ..... TENTANG ..... } 2 Spasi

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA } 2 Spasi

BUPATI INDRAMAYU } 3 Spasi

Menimbang :\_

a.bahwa .....; } 1 1/2 Spasi  
} 2 Spasi

b.bahwa .....; } 1 1/2 Spasi  
} 2 Spasi

c.dan seterusnya ..... } 2 Spasi

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ...Tahun ....tentang ... (Lembaran Negara } 1 1/2 Spasi  
Republik Indonesia Tahun...Nomor., Tambahan Lembaran Negara Republik  
Nomor....);

2. Peraturan Pemerintah Nomor ..Tahun .tentang .(Lembaran Negara } 1 1/2  
Spasi Republik Indonesia Tahun...Nomor., Tambahan Lembaran Negara  
Republik Nomor....);

3. dan seterusnya ..... } 2 Spasi

Dengan persetujuan } 2 Spasi

DEWAN PERWAKILAAAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU } 2 Spasi

M E M U T U S K A N : } 2 Spasi

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU } 2 Spasi  
(Nama Peraturan Daerah)

BAB I } 2 Spasi

Pasal 1 } 2 Spasi

BAB II } 2 Spasi

Pasal ... } 2 Spasi

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR : 13 TAHUN 1999  
TANGGAL : 24 DESEMBER 1999  
TENTANG : TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGUNDANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

### PETUNJUK PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

1. Kerangka suatu Peraturan Daerah terdiri dari :
  - a. Penamaan;
  - b. Pembukaan;
  - c. Batang Tubuh;
  - d. Penutup;
  - e. Lampiran.
2. Penamaan Peraturan Daerah memuat jenis, nomor, tahun dan tentang nama Peraturan Daerah.  
Nama Peraturan Daerah dibuat secara singkat dan jelas serta mencerminkan isi Peraturan Daerah dan ditulis dengan huruf Kapital.
3. Pada Pembukaan Peraturan Daerah memuat Konsiderans “Menimbang”, “Mengingat” dan “ Judul” sebagai berikut :
  - a. Menimbang :
    - 1) Memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang atau alasan-alasan pembuatan Peraturan Daerah.
    - 2). Jika pokok-pokok pikiran dan alasan lebih dari satu, maka pokok-pokok pikiran dimaksud dituangkan secara berurutan dalam huruf a, b, c dan seterusnya.
  - b. Mengingat :
    - 1). Memuat dasar hukum yang terkait secara langsung dengan materi Peraturan Daerah yang akan diatur.
    - 2). Peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum adalah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sampai yang sederajat tingkatnya.
    - 3). Peraturan Daerah yang akan dicabut tidak dicantumkan lagi sebagai dasar hukum, sedangkan Peraturan Daerah yang akan diubah tetap dicantumkan sebagai dasar hukum.
    - 4). Tata urutan dasar hukum pengaturan Peraturan Daerah dimulai dari :
      1. Undang-undang;
      2. Peraturan Pemerintah;
      3. Keputusan Presiden;
      4. Peraturan Menteri;
      5. Keputusan Menteri;
      6. Instruksi Menteri;
      7. Peraturan Daerah.
    - 5). Jika ada dua atau lebih dasar hukum yang sejenisnya, maka peraturan perundang-undangan yang pengeluarannya lebih tua ditempatkan pada urutan pertama.

4. Batang Tubuh :
  - a. Batang Tubuh Peraturan Daerah memuat semua materi Peraturan Daerah yang akan dirumuskan dan apabila materinya luas dapat dituangkan dalam Bab-bab, Bagian, Paragraf, Pasal-pasal dan Ayat-ayat.
  - b. Setiap penulisan “Pasal” atau “Ayat” yang diikuti dengan angka, ditulis huruf awalnya dengan huruf besar.
  - c. Batang Tubuh Peraturan Daerah pada umumnya dikelompokkan dalam Bab-bab yang terdiri dari :
    1. Ketentuan Umum;
    2. Materi yang akan diatur;
    3. Ketentuan Pidana;
    4. Ketentuan Peralihan;
    5. Ketentuan Lain-lain;
    6. Ketentuan Penutup.
5. Penutup Peraturan Daerah adalah bagian akhir dari Peraturan Daerah yang tidak termasuk dalam Batang Tubuh yang memuat Rumusan :
  - a. Redaksi pengundangan Peraturan Daerah;  
Catatan : Oleh karena redaksi pengundangan Peraturan Daerah tidak termasuk Ketentuan penutup, maka pengetikan redaksi pengundangan Peraturan Daerah diberi jarak 2 spasi dibawah redaksi Pasal terakhir pada Ketentuan Penutup.
  - b. Tempat dan tanggal ditetapkannya Peraturan Daerah;
  - c. Penandatanganan oleh Kepala Daerah.
6. Perubahan Peraturan Daerah hanya terdiri dari 2 (dua) Pasal Romawi yang terdiri dari :
  - a. Pasal I : Berisikan materi-materi Bab, Pasal dan Ayat yang akan diubah dan perubahannya.
  - b. Pasal II : Berisikan berlakunya Peraturan Daerah Perubahan.
7. Apabila dipandang perlu untuk memperjelas pengertian dan maksud dari suatu Peraturan Daerah dapat dibuat penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal Demi Pasal yang dijadikan Lampiran Peraturan Daerah.

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR : 13 TAHUN 1999  
TANGGAL : 24 DESEMBER 1999  
TENTANG : TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGUNDANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Contoh Bentuk Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

( Lambang Daerah )

NOMOR : ... TAHUN : ... SERI : ...

PERATURAN DAERAH/KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN INDRAMAYU DAN ATAU KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN INDRAMAYU YANG DI UNDANGKAN

Peraturan Daerah/Keputusan Bupati Kabupaten Indramayu dan atau Keputusan DPRD Kabupaten Indramayu tersebut di atas, ditetapkan pada tanggal.....

BUPATI INDRAMAYU

Cap/ttd

N A M A

Diundangkan di Indramayu  
pada tanggal .....

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

( Tanda tangan )

N A M A

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR .... TAHUN .... SERI .....